

Sejarah Aceh, Antara Damai dan Perang Memaknai Indonesia.*

Oleh

Ibrahim Chalid *

Abstraksi

Aceh merupakan wilayah yang memiliki banyak kelebihan. Tidak hanya pada kekayaan alam tetapi juga budaya. Memahami Aceh tidak mungkin dapat dilepaskan dari masa lalunya. Pemahaman terhadap pedoman hidup yaitu Islam, serta kecintaan dan kecerdasan mereka dalam memahami sejarah masa lalunya harus dikedepankan dalam melihat masyarakat Aceh. Adanya gesekan dengan berbagai budaya sejak masa lampau menjadikan masyarakat Aceh lebih terbuka terhadap perbedaan. Aceh yang multikultur juga memudahkan mereka dalam beradaptasi dengan budaya lain. Penyikapan terhadap para pendatang juga relatif positif sehingga Aceh menjadi daerah yang diminati pendatang lain.

Kata Kunci : Aceh, damai dan perang

I. Sejarah Aceh

Acèh Lhèe Sagoe atau The Triangle Land of Aceh adalah tanah yang berbentuk segitiga yang terletak di ujung utara Pulau Perca Sumatera). Tanah yang berbentuk segitiga ini diperkirakan sudah ada sejak Zaman Batu tengah (Mesolitik). Bukti hunian terlihat dengan ditemukannya bukit-bukit kerang yang oleh penduduk setempat dikenal sebagai bukit kelembai (gergasi). Bukit ini banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Aceh yaitu dari utara Lhokseumawe sampai ke Aceh Tamiang (Alur Itam, Seruway) bahkan sampai ke Langkat (Sukajadi), Deli-Serdang (Bulu Cina) dan Asahan di pantai timur Sumatera Utara.

Bentukan fisik dari Acèh Lhèe Sagoe atau Segitiga Aceh sering disimbolkan dengan jeu'ee atau alat penampi beras. Bagian ujung jeu'ee yang menyempit digambarkan seperti mulut tampah tempat terkumpulnya kotoran beras hasil menampi yang ditepis keluar.

* Makalah ini disampaikan pada Acara kegiatan Focus Groups Discussion (FGD) Mufakat Budaya Melayu Sumatera dengan tema "SUMATERA : SERAMBI BUDAYA MELAYU"). Hotel Oasis Atjeh, Jl. Imuem Lueng Bata, Banda Aceh. 12-14 Desember 2014.

** Dosen Program Studi Antropologi Universitas Malikusalah dan Mahasiswa S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya.

Populasi awal yang mendiami Acèh Lhèe Sagoe tergolong dalam ras Australomelanesid yang merupakan populasi umum di tempat lain di Asia Tenggara. Sekitar masa Neolitik mulai terjadi pergantian populasi dengan sub-ras Malayo-Indonesid yang tergolong ke dalam Monggolid Selatan. Sub-ras ini bertutur dalam rumpun bahasa Malayo-Polinesia golongan Barat. Temuan tengkorak manusia terlihat berbentuk lonjong dan diberi hematit, berbadan agak pendek, dengan panjang usia (perkiraan rata-rata umur mati) mencapai 30-35 tahun.

a. Asal Muasal Aceh

Orang Aceh merupakan rumpun Melayu yaitu bangsa-bangsa Mante (Bante), Lanun, Sakai Jakun, Semang (orang Laut), dan Senui yang berasal dari negeri Perak dan Pahang dari Tanah Semenanjung Malaka. Menurut Etnologinya, bangsa ini berhubungan dengan bangsa Phoenisia di Babylonia dan bangsa Dravida di lembah sungai Indus dan Gangga.

Bangsa Mante pertama kali mendiami wilayah Aceh Besar. Mereka tinggal di Simeulue yang disebut juga sebagai Kampung Rumoh Dua Blaih. Letaknya di atas Simeulue yaitu antara Kanto dan Tangse. Simeulue ini artinya dataran yang luas. Bangsa Mante inilah yang berkembang di seluruh lembah Aceh segitiga dan berpindah ke lain tempat. Ini berarti bangsa Mante bisa dikatakan sebagai orang Aceh asli (pribumi)¹. Suku ini mempunyai ciri-ciri dan postur tubuh yang agak kecil dibandingkan dengan orang Aceh sekarang. Diduga suku Manteu ini mempunyai kaitan dengan suku bangsa Mantera di Malaka, bagian dari bangsa Khmer dari Hindia Belakang (Birma atau Myanmar, Bangladesh, Srilanka).

Interaksi pertama penduduk Aceh diperkirakan dengan Campa (Kamboja). Ini terlihat dari keterkaitan bahasa. Bahasa ureueng Acèh atau orang Aceh termasuk dalam keluarga bahasa Hesperonesia. Pada masa itu, bahasa Aceh mungkin sudah bersuku satu atau monosibalik dan banyak mempunyai diftong. Bahasa Aceh diperkirakan mempunyai keterkaitan dengan bahasa Campa dan juga bahasa Cina. Perkembangan selanjutnya setelah era perdagangan terbuka, terjadi kontak-bahasa dengan bahasa-bahasa India (seperti: Tamil, Hindi, Sansekerta), Sri Lanka (Singgala), Parsi, Arab, Turki, Portugis, Inggris dan Belanda. Pengaruh Negrid terjadi melalui budak-budak Afrika yang dibeli di Arab. Tidak mengherankan jika saat ini ada unsur Monggolid, Indidi, Dravidid, Orientalid, Armenid, dan Europpid di Aceh.

¹ HM Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*. Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1961, hal 15

Jika diperhatikan, penduduk Aceh sekarang tampak ada persamaan dengan penduduk Sumatera Timur dan barat, Semenanjung Melayu, Siam (Thailand), Kamboja, Bangladesh, India, Srilanka dan Pakistan. Hubungan dengan Sakai, Orang Asli Malaysia (Senoi, Semang) dan Andaman-Nikobar tidak begitu kentara.

Pada perkembangannya, banyak bangsa asing yang datang ke wilayah ini. Bangsa India dan Arab dikenal erat hubungannya dengan Aceh pasca penyebaran Agama Islam di tanah Aceh. Orang India datang ke Aceh antara abad 4-5 Masehi. Mereka membawa agama hindu dan peradaban agraris ke Aceh. Beragam masakan, adat perkawinan, fashion dan dandanan dipengaruhi India. Tak hanya itu, India juga mengenalkan sistem pertanian sawah yang lebih teknologis.

Keturunan bangsa India kebanyakan dari Gujarat dan Tamil. Ini terlihat dengan penampilan wajah bangsa Aceh, serta variasi makanan (cotohnya kari) dan juga warisan kebudayaan Hindu tua (nama-nama desa yang diambil dari bahasa India, contoh: Indra Puri). Keturunan India dapat ditemukan tersebar di seluruh Aceh. Karena letak geografis yang berdekatan maka keturunan India cukup dominan di Aceh.

Orang Timur-Tengah dan Gujarat Islam datang pertama kali abad 9 (800 M) mendarat di Peureulak (pimpinan nahkoda khalifah terdiri dari Arab Quraisy, Palestina, Persia dan India). Bangsa Arab yang datang ke Aceh banyak yang berasal dari provinsi Hadramaut di Negeri Yaman, dibuktikan dengan marga: Al Aydrus, Al Habsyi, Al Attas, Al Kathiri, Badjubier, Sungkar, Bawazier dan lain-lain. Nama-nama tersebut merupakan marga bangsa Arab asal Yaman yang dulunya datang sebagai ulama dan berdagang. Saat ini banyak dari mereka yang sudah kawin campur dengan penduduk asli Aceh dan menghilangkan nama marganya.

Pedagang Tiongkok juga pernah memiliki hubungan yang erat dengan bangsa Aceh, dibuktikan dengan kedatangan Laksamana asal Tiongkok Cheng Ho, yang pernah singgah. Tak hanya itu, Ceng Ho juga menghadiahkan Aceh dengan sebuah lonceng besar, yang sekarang dikenal dengan nama Lonceng Cakra Donya, tersimpan di Banda Aceh. Pelaut Tiongkok menjadikan Aceh sebagai pelabuhan transit utama sebelum melanjutkan pelayarannya ke Eropa.

Banyak juga keturunan bangsa Persia, seperti: Iran, Afghanistan dan Turki, di mana mereka pernah datang atas undangan Kerajaan Aceh untuk menjadi ulama, pedagang senjata, pelatih prajurit dan serdadu perang kerajaan Aceh. Saat ini keturunan mereka kebanyakan tersebar di wilayah Aceh Besar. Hingga saat ini bangsa Aceh sangat menyukai nama-nama warisan Persia dan Turki. Contohnya adalah penyebutan Banda,

dalam nama kota Banda Aceh pun adalah warisan bangsa Persia, dimana kata banda atau bandar mempunyai arti pelabuhan.

Di samping itu ada pula keturunan bangsa Portugis, di wilayah Kuala Daya - Lamno yang berada di pesisir barat Aceh. Mereka adalah keturunan dari pelaut-pelaut Portugis di bawah pimpinan Nakhoda Kaptan Pinto yang berlayar hendak menuju Malaka (Malaysia) dan sempat singgah dan berdagang di wilayah Lamno. Sebagian besar di antara mereka tetap tinggal dan menetap di Lamno. Sejarah mencatat peristiwa ini terjadi antara tahun 1492-1511, pada saat itu Lamno di bawah kekuasaan kerajaan kecil Lamno, pimpinan Raja Mereuhoem Daya. Hingga saat ini masih dapat dilihat keturunan mereka yang masih memiliki profil wajah Eropa yang masih kental.

Banyaknya percampuran yang terjadi di Aceh seakan mengamini pernyataan yang dikemukakan Julius Jacob, seorang sarjana Belanda dalam karyanya *Het Familie en Kampongleven Op Groot Atjeh* (1894) (Kehidupan Kampung dan Keluarga di Aceh Besar). Di sini Jakob mengatakan bahwa orang Aceh adalah suatu anthropologis mixtum, suatu percampuran darah yang berasal dari pelbagai suku bangsa pendatang. Ada yang berasal dari Semenanjung Melayu, Melayu-Minangkabau, Batak, Nias, orang-orang India, Arab, Habsyi, Bugis, Jawa, dan sebagainya.

Adapun penyebutan nama Aceh memiliki sejarah yang panjang. Kurang lebih tahun 400 M (abad ke-5 M) bangsa-bangsa yang mengunjungi Aceh menyebut bangsa ini dengan sebutan yang beragam. Saat itu bangsa Arab menyebut jazirah Sumatera Utara dengan Rami (Ramni), sedangkan Tionghoa menamainya dengan Lan-li, Lan-wuli, Nan-wuli atau Nan-poli. Marcopolo menyebut negeri itu Lambri, sedangkan sejarah Melayu menyebutnya Lambri (Lamiri). Adapun orang Portugis dan Italia menyebutnya Achem, Achen, atau Aceh. Orang Arab menyebutnya Asji, Dachim, Dagin, atau Dacim. Penulis-penulis Perancis menyebutnya sebagai Achem, Achen, achim, dan selanjutnya Acheh. Demikian pula dengan Inggris dan Belanda menyebutnya sebagai Acheem, Achim. Orang Aceh sendiri dalam *Tarich Melayu* maupun mata uang lama (emas, timah) menyebutnya Atjeh.

b. Islam di Aceh

Pada tahun 173 H atau 800 M di Bandar Peureulak (Aceh Timur) berlabuh kapal pedagang yang membawa saudagara dari teluk Kambay (Gujarat) yang dipimpin seorang kalifah. Pedagang ini mengajarkan Islam kepada penduduk setempat. Kurang dari setengah abad di Peureulak terorganisasi masyarakat islam yang terdiri dari orang-orang keturunan penduduk pribumi, campuran peranakan Arab, Persia dan Gujarat. Pada

akhirnya, mereka bersatu memproklamkan berdirinya kerajaan Islam Peureulak pada 1 Muharram tahun 840 M dipimpin oleh sultannya yang pertama Sultan Alauddin Sayed Maulana Abdul Aziz Syah yang merupakan orang Iran dan bermazhab Syiah.

Beriringan dengan pengangkatan Sultan pertama itu, ibu kota kerajaan: Bandar Peureulak dipindahkan agak ke pedalaman dan namanya diganti dengan Bandar Khalifah sebagai kenang-kenangan kepada Nakhoda Khalifah yang telah berjasa membawa angkatan dakwah ke Peureulak (letaknya kira-kira 6 Km dari kota Peureulak sekarang dan kota tersebut sampai kini masih ada). Di wilayah inilah akhirnya terjadi perkawinan campuran dengan para pendatang. Mereka mengenal sistem politik yang didasar oleh ikatan ummah bukan keluarga. Hubungan darah atau nasionalisme genetik atau nasionalisme agama adalah bagian penting yang dibawa oleh Islam.

Pada pemerintahan sultan kedua yaitu Sultan Alauddin Saiyid Maulana Abdurrahim Syah (249-285 H = 864-888 M) mulai digalakan pembangunan pendidikan Islam dan kemajuan ekonomi. Pada tahun 250 H dibangun sebuah lembaga pendidikan Islam, yaitu: Dayah Bukit Ce Breek. Pada masa pemerintahan sultan ketiga yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Saiyid Maulana Abbas Syah (285-300 H = 888-913 M) pembangunan Peureulak sebagai kerajaan Islam telah mulai nampak dalam berbagai bidang kehidupan. Ini terlihat dari berbagai hasil antara lain pertanian (lada dan hasil hutan), pertambangan (emas di daerah Alue Meuh), kesenian (ukiran-ukiran dari gading gajah dan kayu, rapa'i, seni baca Qur'an, qasidah dan lain-lain). Selain itu untuk peningkatan kemajuan ilmu pengetahuan sebuah pendidikan lembaga baru juga didirikan, yaitu Dayah Cot Kala pada tahun 899 M di sebuah dataran yang disebut Aramia di sebelah Selatan Bandar Peureulak.

Pada pemerintahan sultan yang keempat yaitu Sultan Alauddin Saiyid Maulana Ali Mughayat Syah (302-305 H = 915-918 M) terjadi peristiwa penting yaitu pecahnya perang saudara yang berpangkal pada pertentangan antara aliran Syi'ah dengan Ahlussunnah (Suni). Peperangan ini berakhir dengan tumbangnyanya pemerintahan Saiyid (dinasti Azizah) yang beraliran Syi'ah dan timbulnya dinasti Makhdum dari bangsawan asli Peureulak (Meurah) yang beraliran Ahlussunnah sehingga kesultanan berikutnya dipimpin oleh golongan Suni.

Pada tahun 362 H (956 M), setelah meninggalnya sultan ketujuh, Sultan Makhdum Alaidin Abdul Malik Shah Johan Berdaulat, terjadi lagi pergolakan selama kurang lebih empat tahun antara Syiah dan Sunni yang diakhiri dengan perdamaian dan pembagian kerajaan menjadi dua bagian yaitu:

- Perlak Pesisir (Syiah) dipimpin oleh Sultan Alaidin Syed Maulana Shah (986 – 988 M)
- Perlak Pedalaman (Sunni) dipimpin oleh Sultan Makhdum Alaidin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat (986 – 1023 M)

c. Kerajaan Islam di Aceh

Masyarakat dan budaya Melayu-Aceh tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan Islam. Awal masuknya Islam ke Nusantara dimulai di Aceh dan beberapa kerajaan Islam pernah terdapat di Aceh pada masa lampau, antara lain kerajaan Islam Perlak (840 M) dipandang kerajaan Islam pertama di Nusantara, serta kerajaan Islam Samudera Pasai (1042 M) dan kerajaan Islam Aceh Darussalam (1511 M) yang merupakan dua buah kerajaan Islam yang besar di Aceh pada masanya. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan hasil peleburan sejumlah kerajaan Islam yang kecil-kecil yang ada pada masa pemerintahan raja yang pertama, yaitu Sultan Ali Mughayatsyah (1514-1530).

Sultan ke-17 Peureulak, Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat (memerintah 1230–1267) menjalankan politik persahabatan dengan menikahkan dua orang putrinya dengan penguasa negeri tetangga Peureulak. Putri Ratna Kamala, dikawinkan dengan Raja Kerajaan Malaka, Sultan Muhammad Shah (Parameswara). Putri Ganggang, dikawinkan dengan Raja Kerajaan Samudera Pasai, Al Malik Al-Saleh.

Sultan terakhir Peureulak adalah sultan ke-18, Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat (memerintah 1267 – 1292). Setelah ia meninggal, Peureulak disatukan dengan Kerajaan Samudera Pasai di bawah pemerintahan sultan Samudera Pasai, Sultan Muhammad Malik Al Zahir, putra Al Malik Al-Saleh.

Kerajaan Samudera Pasai terletak di Aceh, dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 M. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja Pasai di kampung Geudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudera di desa Beuringin, kecamatan Samudera, sekitar 17 km sebelah timur Lhokseumawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik al-Saleh,

Raja Pasai pertama. Malik al-Saleh adalah nama baru Meurah Silu setelah ia masuk Islam. Berkuasa lebih kurang 29 tahun (1297-1326 M). Kerajaan Samudera Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pase dan Peurlak. Pada tahun 1360 M kerajaan ini ditaklukkan oleh Majapahit sehingga terus mengalami kemunduran.

Pada abad ke 16 berdiri kerajaan Islam Aceh Darussalam yang merupakan hasil peleburan kerajaan Islam Aceh di belahan Barat dan Kerajaan Islam Samudra Pasai di belahan Timur. Putra Sultan Abidin Syamsu Syah diangkat menjadi Raja dengan gelar Sultan Alaudin Ali Mughayat Syah. Pada awalnya, wilayah kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh ayah Ali Mughayat Syah. Ketika Mughayat Syah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya, termasuk menaklukkan kerajaan Pasai. Mughayat Syah naik tahta pada Ahad, 1 Jumadil Awal 913 H atau 8 September 1507 M.

Sekitar tahun 1511 M, kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di Aceh dan pesisir timur Sumatera seperti Peurelak (di Aceh Timur), Pedir (di Pidie), Daya (Aceh Barat Daya) dan Aru (di Sumatera Utara) sudah berada di bawah pengaruh kolonial Portugis. Mughayat Syah dikenal sangat anti pada Portugis, karena itu, untuk menghambat pengaruh Portugis, kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian ia taklukkan dan masukkan ke dalam wilayah kerajaannya. Sejak saat itu, kerajaan Aceh lebih dikenal dengan nama Aceh Darussalam dengan wilayah yang luas, hasil dari penaklukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya.

Sejarah mencatat bahwa, usaha Mughayat Syah untuk mengusir Portugis dari seluruh bumi Aceh dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang sudah berada di bawah Portugis berjalan lancar. Secara berurutan, Portugis yang berada di daerah Daya ia gempur dan berhasil ia kalahkan. Ketika Portugis mundur ke Pidie, Mughayat juga menggempur Pidie, sehingga Portugis terpaksa mundur ke Pasai. Mughayat kemudian melanjutkan gempurannya dan berhasil merebut benteng Portugis di Pasai.

Ketika benteng di Pasai telah dikuasai Aceh, Portugis mundur ke Peurelak. Peurelak kemudian juga diserang, sehingga Portugis mundur ke Aru. Tak berapa lama, Aru juga berhasil direbut oleh Aceh hingga akhirnya Portugis mundur ke Malaka. Dengan kekuatan besar, Aceh kemudian melanjutkan serangan untuk mengejar Portugis ke Malaka dan Malaka berhasil direbut. Portugis melarikan diri ke Goa, India. Seiring dengan itu, Aceh melanjutkan ekspansinya dengan menaklukkan Johor, Pahang dan Pattani. Dengan keberhasilan serangan ini, wilayah kerajaan Aceh Darussalam mencakup hampir separuh

wilayah pulau Sumatera, sebagian Semenanjung Malaya hingga Pattani. Demikianlah, walaupun masa kepemimpinan Mughayat Syah relatif singkat, hanya sampai tahun 1528 M, namun ia berhasil membangun kerajaan Aceh yang besar dan kokoh.

Bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan Kerajaan Aceh adalah Gampong (Kampung), yang dikepalai oleh seorang Keucik dan Waki (wakil). Gampong-gampong yang letaknya berdekatan dan yang penduduknya melakukan ibadah bersama pada hari jum'at di sebuah masjid merupakan suatu kekuasaan wilayah yang disebut mukim. Adapun yang memegang peranan pimpinan mukim disebut Imeum mukim.

Kerajaan Aceh mulai mengalami masa keemasan atau puncak kekuasaan di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, yaitu sekitar tahun 1607 sampai tahun 1636. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengalami peningkatan dalam berbagai bidang, yakni dalam bidang politik, ekonomi-perdagangan, hubungan internasional, memperkuat armada perangnya, serta mampu mengembangkan dan memperkuat kehidupan Islam. Bahkan kedudukan Bangsa Portugis di Malaka pun semakin terdesak akibat perkembangan yang sangat pesat dari Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda (Poesponegoro: 2010, 31)

Sultan Iskandar Muda memperluas wilayah teritorialnya dan terus meningkatkan perdagangan rempah-rempah menjadi suatu komoditi ekspor yang berpotensi bagi kemakmuran masyarakat Aceh. Ia mampu menguasai Pahang tahun 1618, daerah Kedah tahun 1619, serta Perak pada tahun 1620, dimana daerah tersebut merupakan daerah penghasil timah. Bahkan dimasa kepemimpinannya Kerajaan Aceh mampu menyerang Johor dan Melayu hingga Singapura sekitar tahun 1613 dan 1615. Ia pun diberi gelar Iskandar Agung dari Timur.

Kemajuan dibidang politik luar negeri pada era Sultan Iskandar Muda, salah satunya yaitu Aceh yang bergaul dengan Turki, Inggris, Belanda dan Perancis. Ia pernah mengirimkan utusannya ke Turki dengan memberikan sebuah hadiah lada sicupak atau lada sekarung, lalu dibalas dengan kesultanan Turki dengan memberikan sebuah meriam perang dan bala tentara, untuk membantu Kerajaan Aceh dalam peperangan. Bahkan pemimpin Turki mengirimkan sebuah bintang jasa pada sultan Aceh (Harry Kawilarang, 2008: 21-22).

Sependinggal Iskandar Muda, Kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Tsani (1636-1641). Sayangnya sultan ini tidak setegas Sultan Iskandar Muda sehingga dalam kepemimpinannya, Kerajaan Aceh Darussalam tidak sekuat pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, pada masa pemerintahannya, muncul seorang ulama besar

yg bernama Nuruddin ar-Raniri. Ia menulis buku sejarah Aceh berjudul *Bustanu'ssalatin*. Sebagai ulama besar, Nuruddin ar-Raniri sangat di hormati oleh Sultan Iskandar Tsani dan keluarganya serta oleh rakyat Aceh. Setelah Sultan Iskandar Tsani wafat, karena tidak memiliki anak, tahta kerajaan di pegang oleh permaisurinya (putri Sultan Iskandar Muda) dengan gelar Putri Sri Alam Permaisuri (1641-1675 M).

Ketika naik tahta, Putri Sri Alam bergelar Paduka Sri Sultanah Ratu Safiatuddin Tajul-A'lam Syah Johan Berdaulat Zillu'llahi fi'i-'Alam. Ia merupakan wanita pertama yang memimpin Kerajaan Aceh. Meski dalam pemerintahannya terjadi banyak pergolakan dan upaya kudeta dan tidak semaju kepemimpinan ayahnya, tetapi ratu ini mampu meningkatkan perkembangan perekonomian, kebudayaan dan kesusastraan di Aceh. Ia pula yang membangun perpustakaan di kerajaan tersebut. Memimpin selama 35 tahun, Safiatuddin drongrong oleh berbagai persoalan yang sebagian besar sebagai akibat penolakan atas kepemimpinan perempuan di wilayah tersebut. meski demikian, kenyataanya setelah Sultanah Safiatuddin mangkat kepemimpinan jatuh lagi ke tangan wanita yaitu Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678).

Pada masa pemerintahan Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah terjadi perubahan di bidang struktur administrasi pemerintahan yaitu di luar daerah yang langsung diperintah oleh Sultanah. Daerah Aceh Besar dibagi dalam 3 bagian daerah besar yang sedikit banyaknya menyerupai segi tiga di sekeliling daerah yang langsung diperintah oleh Sultanah dan karenanya dinamakan Aceh Tiga Sagi (Acèh Lhèe Sagoe). Sehubungan dengan jumlah mesjid-mesjid yang terdapat di dalam daerah tersebut, maka bagian-bagian itu dinamakan Sagi XXII, XXV dan XXVI sedangkan para kepalanya dikenal dengan nama Panglima Tiga Sagi. Pada awalnya pengangkatan para Panglima Tiga Sagi itu bukan dimaksudkan supaya mereka melakukan pemerintahan sendiri-sendiri terhadap sesuatu negeri, tetapi lebih banyak untuk melakukan tugas pengawasan perintah-perintah pemerintah pusat yang disampaikan kepada para Uleebalang telah dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu para kepala Sagi dapat bertindak sebagai panglima pada masa terjadi peperangan seperti diartikan degan perkataan panglima itu.

Kepemimpinan Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah hanya berlangsung sekitar 3 tahun karena mangkat dan digantikan oleh Ratu Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688). Selama kepemimpinan para Sultanah ini kerajaan Aceh mulai memudar kharismanya disebabkan pergolakan politik pro dan kontra terhadap kepemimpinan wanita. Terakhir Sultanah Kamalat Zainatuddin Syah bertahta pada tahun 1688-1699. Pro dan kontra terhadap kepemimpinan wanita akhirnya melengserkan Sultanah Kamalayut Syah.

Kepemimpinan beralih kembali kepada pria dengan diangkatnya Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin menjadi Sultan. Mulai saat itu pemerintahan dipimpin oleh Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin (1699-1702). Setelah tiga tahun memerintah, baginda disuruh turun dari tahtanya oleh rakyat. Setelah peristiwa tersebut empat sultan keturunan Arab lainnya diangkat sebagai Sultan Aceh hingga tahun 1726 yaitu, Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui Ibnu Syarif Ibrahim (1702-1703), yang merupakan keponakan Sultanah Kamalat Syah. Pada bulan Juni 1703 kepemimpinan beralih kepada Sultan Jamalul Alam Badrul Munir.

Beliau merupakan putra Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin. Pada bulan Agustus 1703 Jamalul Alam Badrul Munir baru mendapatkan pengakuan sebagai Sultan sehingga berkuasa mulai 1703-1726. Di bawah pemerintahannya daerah Batubara (kini di Provinsi Sumatra Utara) memisahkan diri dan baginda dipaksa lari oleh pemberontakan umum pada tahun 1726.

Pada bulan Juni 1727 dengan suara bulat ketiga Panglima Sagi memilih Maharajalela Melayu menjadi Sultan dengan gelar Sultan Alaidin Ahmad Syah (1727-1735) putra Abdurrahim Maharajalela Bin Zainal Abidin (Teungku di Lhong) bin Daeng Mansur juga yang bergelar Teungku Chik Di Reubee mertua Sultan Iskandar Muda. Dengan demikian pemerintahan di Aceh kembali dipangku oleh Sultan berdarah Aceh-Bugis.

Sepeninggalnya, Aceh dipimpin oleh Sultan Alaidin Johan Syah (1735-1760) selalu dihadapkan pada pertentangan yang dilancarkan oleh Sultan Jamalul Alam Badrul Munir yang ingin berkuasa kembali. Namun, kedua Sultan yang hidup pada masa yang berbeda memiliki visi yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan diantaranya mereka dapat membuka hubungan perdagangan dengan Inggris dan Perancis tanpa memberi izin kepada mereka membuka benteng.[6] Sultan Alaidin Johan Syah (Pocut Uek) digantikan oleh Sultan Alaidin Mahmud Syah (1760-1781). Salah satu keberhasilannya adalah kenegerian Barus kembali kepangkuan Aceh pada tahun 1778 yang sebelumnya diduduki oleh Belanda. Sultan Alaidin Mahmudsyah berturut-turut digantikan oleh Sultan Alaidin Muhammad Syah (1781-1795), Sultan Aleidin Alam Syah (1795-1824), Sultan Muhammad Syah pada 1824-1836, masa-masa ini adalah semakin gencarnya infiltrasi Barat (Inggris) ke Pulau Sumatra.

Sultan Muhammad diganti oleh Sultan Alaidin Ibrahim Mansyur Syah (1836-1870) masa pemerintahan beliau satu persatu daerah kekuasaan Aceh di luar Pulau

Sumatra jatuh ke tangan Belanda diantaranya Barus dan Nias. Sultan Alaidin Ibrahim Mansyur Syah digantikan oleh Sultan Alaidin Mahmud Syah (1870-1874).

Pada tahun 1873 pecahlah perang Belanda di Aceh yang dimulai dengan Agresi Militer Belanda I. Inilah awal perang yang memunculkan keheroikan masyarakat Aceh. Agresi Belanda terhadap Aceh adalah awal kesengsaraan hingga pupusnya kesultanan Aceh. Akibat perang yang memakan waktu lebih 40 tahun menghancurkan bukan saja dalam bentuk fisik berupa lambang-lambang kerajaan seperti istana (Dalam), mesjid raya tetapi juga dengan pengasingan Sultan yaitu Sultan Alaidin Mahmud Daud Syah.

II. Peperangan di Aceh

Masyarakat Aceh pada masa Kerajaan Aceh Darussalam merupakan kerajaan Islam yang besar. Kedatangan Portugis dan Belanda dalam wilayah mereka yang bermaksud merubah pandangan dan prinsip hidup mereka, dianggap telah membuat sihe't (miring). Oleh karena itu Portugis dan Belanda harus diluruskan. Namun kedua bangsa tersebut tetap mengusik kehidupan masyarakat sehingga timbul peperangan. Perang mengusir Portugis berjalan selama 120 tahun (1515-1636)².

Tak hanya perang melawan Portugis, Aceh juga sempat memanggul senjata melawan Belanda. Sikap Belanda yang ingin menguasai Aceh karena kekayaan alam dan lokasinya yang strategis, maka pada 26 Maret 1873 Belanda menyatakan perang kepada sultan Aceh. Tantangan yang disebut 'Perang Sabi' ini berlangsung selama 30 tahun dan memaksa Sultan Aceh Terakhir yaitu Muhammad Daud untuk mengakui kedaulatan Belanda di tanah Aceh. Pengakuan tersebut membuat Aceh resmi masuk secara administratif ke dalam Hindia Timur Belanda (Nederlansch Oost-Indie) dalam bentuk provinsi. Pada tahun 1937 bentuknya berubah menjadi karesidenan hingga kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia berakhir.

Peperangan beralih melawan penjajah Jepang yang datang pada 1942. perang berakhir dengan menyerrahnya Jepang kepada Sekutu tahun 1945. Saat perang kemerdekaan, sumbangan dan keikutsertaan rakyat Aceh dalam perjuangan sangat besar sehingga Presiden Soekarno memberikan julukan sebagai 'daerah modal.' Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Aceh merupakan salah satu daerah yang menyatakan diri masuk dalam bagian wilayahnya menjadi sebuah karesidenan dari Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 1/X tanggal 3 Oktober 1945 diangkat Teuku Nyak Arief sebagai Residen.

² Umar, op. cit., hal 53

Kedudukan Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) mengalami beberapa kali perubahan status. Pada masa awal revolusi kemerdekaan, Karesidenan Aceh pada awal 1947 berada di bawah administratif Sumatera Utara. Namun dengan adanya agresi militer Belanda, Karesidenan Aceh, Langkat, dan Tanah Karo ditetapkan menjadi Daerah Militer yang berkedudukan di Kutaradja (sekarang Banda Aceh) dengan Gubernur Militer teungku Muhammad Daud Beureueh.

Pada perkembangannya, setelah vakum hingga pertengahan 2005 dengan dukungan pemerintah setempat saat ini beberapa daerah keturunan raja menghidupkan kembali kesultanan tetapi hanya dalam arti menjaga budaya lokal seperti di Pantai Barat Aceh. Undang-undang Otonomi daerah digunakan sebagai sandaran payung hukum berdirinya kembali kerajaan tersebut.

III. Worldview Orang Aceh dan Keindonesian.

Tindakan masyarakat atau orang dipengaruhi oleh kepercayaan, pengetahuan, nilai-nilai dan perasaan. Maka tindakan manusia adalah tindakan yang kompleks. Kepercayaan, pengetahuan, nilai-nilai dan perasaan dibentuk oleh worldview masing-masing orang atau masyarakat. Worldview adalah basis bagi lahirnya tindakan-tindakan. Worldview (*welanschauung*) menurut Weber adalah *the belief system of a particular social group*.

Islam (Islam Dayah) sebagai dasar sistem kepercayaan (worldview) orang Aceh. Islam dasar referensi yang membentuk nilai-nilai, kepercayaan, pengetahuan dan perasaan yang menjadi pijakan tindakan orang Aceh. Maka tindakan apapun yang dilakukan orang Aceh harus dipahami sebagai pengejawantahan dari Islam yang mereka pahami.

Latar belakang agama Islam yang kuat menjadikan masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang taat pada pemimpin. Mereka menginginkan pemimpin haruslah religius, cerdas, adil dan tegas. Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang terbuka terhadap kebenaran dan kebaikan (inklusif). Mereka sangat fanatik terhadap hal yang diyakini benar dan baik. Meski demikian, masyarakat Aceh sangat menghormati perbedaan (multikultur). Ini terkait dengan latar belakang mereka yang sudah bersentuhan dengan banyak bangsa dan budaya dari masa yang sangat panjang. Masyarakat Aceh juga sangat bangga dengan kegemilangannya di masa lalu baik sebagai daerah pertama masuknya Islam di Indonesia, kebesaran kesultanan jaman dahulu, maupun keheroikan mereka dalam mempertahankan wilayah.

Kepustakaan

- Ahmad, Zakaria, et.al., *Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme*, (Banda Aceh: Pena, 2008) .
- Ali, Fachry, *The Revolts of the Nation-State Builders: A Comparative Study of the Acehese Darul Islam and the West Sumatrans PRRI Rebellions (1953-1962)*, (Australia: Thesis Master of Arts, Department of History, Monash University, 1994).
- Alfian, Ibrahim, *Perang di Jalan Allah 1873-1912*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987) .
- , *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999).
- , *Perang Kolonial Belanda di Aceh*, (Banda Aceh: PDIA, 1997).
- , *Mata Uang Mas Kerajaan-Kerajaan Aceh*, (Banda Aceh: Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah istimewa Aceh, 1979) .
-, *Arus Nilai Baru Masyarakat Aceh Dalam Konsep pembangunan Berwawasan Nusantara*, (Jakarta : Gramedia, 1989) .
- Hasymy, A, *Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977) .
 - -----, *Peranan Islam, Dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981) .
 - -----, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Beuna, 1983).
 - -----, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
- ISMUHA, *Adat dan Agama di Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala, 1983).
- Lombard, Denys, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, (Jakarta: Forum Jakarta-Paris, 2006).
- Morris, Eric, Eugene, *Islam And Politic in Aceh: A Study of Center-Periphery Relations in Indonesia*, (USA: Thesis Cornell University, 1983) .
- Sufi, Rusdi, dkk, *Peranan Tokoh Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950 di Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2003).
- , *Tgk. Hasan Krueng Kalee dan Teuku Nyak Arief, Profil Ulama dan Umara Aceh*, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006)
- , *Perpaduan Adat dan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006)
- Sulaiman, M. Isa, *Sejarah Aceh, sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987)
- , *Aceh Merdeka, Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Nirzalin, *Ulama dan Politik, Menelaah Hubungan Kekuasaan Teungku Dayah dan Negara*, (Yogyakarta: Maghza Pustaka, 2012).
- Kawilarang, Harry. *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Palembang: Bandar Publishing, 2008.
- Poesponegoro, *Marwati. Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010